

## **Analisis Efektifitas dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan Indonesia: a Literature Review**

**Anisya Febriyanti**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

**Safinah Annajah**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2010713083@mahasiswa.upnvj.ac.id

**Siti Humaira Syarif**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2010713146@mahasiswa.upnvj.ac.id

**Marina Ery Setiyawati**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

marinaerysetiawati@upnvj.ac.id

Korespondensi penulis: 2010713026@mahasiswa.upnvj.ac.id

**Abstract.** *According to data from the Otoritas Jasa Keuangan in 2020, Indonesia's banking assets have increased to IDR 9,333 trillion, but tend to be lower than some countries in the Southeast Asian Region. The financial services industry also plays an important role in achieving the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs is a development agreement that generally aims to organize a peaceful society without violence, non-discrimination, participation, open governance and multi-party partnership cooperation. This relates to the application of sustainable finance principles and environmental, social and governance (ESG) aspects in the operations of financial services companies. ESG is also referred to as a parameter for the implementation of SDGs development. To implement the SDGs, a partnership of financial institutions is required. This is in line with SDGs goal point 17, namely partnerships for the goals. The study aims to determine the effectiveness of SDGs implementation in financial industry partnerships. This research uses the Literature Review method with national quality scientific journals as the data. The results of the study show that the effectiveness of the application of banking industry partnerships implemented in Indonesia has been running well. Banking partnerships provide many benefits, especially in the economic sector in Indonesia. The banking industry partnership can also provide opportunities for the entire entrepreneurial sector and UMKM in Indonesia.*

**Keywords:** *Banking, Effectivity, Industry, SDGs*

**Abstrak.** Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020, aset perbankan Indonesia mengalami peningkatan hingga Rp9.333 triliun tetapi cenderung lebih rendah dari beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara. Industri jasa keuangan juga sangat berperan penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Sustainable Development Goals

---

Received November 30, 2022; Revised Desember 18, 2022; Desember 30, 2022

\* Aurora Fahriza Pribadi, aurorafahriza34@gmail.com

(SDGs) merupakan sebuah kesepakatan pembangunan yang secara umum memiliki tujuan untuk mengatur agar masyarakat damai tanpa kekerasan, non diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi pihak. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan jasa keuangan. ESG juga disebut sebagai parameter pelaksanaan pembangunan SDGs. Untuk mengimplementasikan SDGs, diperlukan kemitraan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan SDGs dalam kemitraan industri keuangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau Systematic Literature Review dengan jurnal ilmiah yang berkualitas nasional sebagai datanya. Hasil dari penelitian menunjukkan efektifitas penerapan kemitraan industri perbankan yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Kemitraan perbankan memberikan banyak keuntungan khususnya dalam bidang perekonomian di Indonesia. Kemitraan industri perbankan juga dapat memberikan peluang kepada seluruh sektor wirausaha dan UMKM di Indonesia.

**Kata kunci:** Efektifitas, Industri, Perbankan, SDGs

## **LATAR BELAKANG**

Kinerja ekonomi di Indonesia terus meningkat dan stabil dengan pencapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 meningkat sebesar 5,03%. Sektor keuangan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara umum industri jasa keuangan di Indonesia terus berkembang, namun diantara negara di kawasan Asia Tenggara jasa keuangan Indonesia relatif lebih rendah. Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020, aset perbankan Indonesia mencapai Rp9.333 triliun atau sebesar 59,5% terhadap Produk Domestik Bruto, hal tersebut adalah suatu peningkatan aset perbankan Indonesia pada tahun 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Namun negara-negara pada Kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Filipina, Thailand dan Malaysia memiliki aset perbankan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki aset perbankan relatif rendah. Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, salah satu sektor yang berkontribusi adalah sektor jasa keuangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Industri jasa keuangan juga sangat berperan penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam

operasional perusahaan jasa keuangan. ESG juga disebut sebagai parameter pelaksanaan pembangunan SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan pembangunan yang secara umum memiliki tujuan untuk mengatur dan memberikan prosedur agar masyarakat damai tanpa kekerasan, non diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi pihak (Michael, 2015). SDGs memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan secara berkesinambungan dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan hidup, kehidupan sosial masyarakat serta pembangunan dalam menjamin keadilan dan melaksanakan tata kelola untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup generasi yang dijabarkan dengan 17 tujuan dan 169 target (Peraturan Presiden RI, 2017). 4 pilar utama yang dimiliki SDGs 2030 yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Indonesia termasuk negara yang menyetujui untuk mengadopsi dan melaksanakan tujuan tersebut. Tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan wajib dilakukan oleh seluruh negara yang melakukan kesepakatan tersebut. Untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, diperlukan kemitraan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.

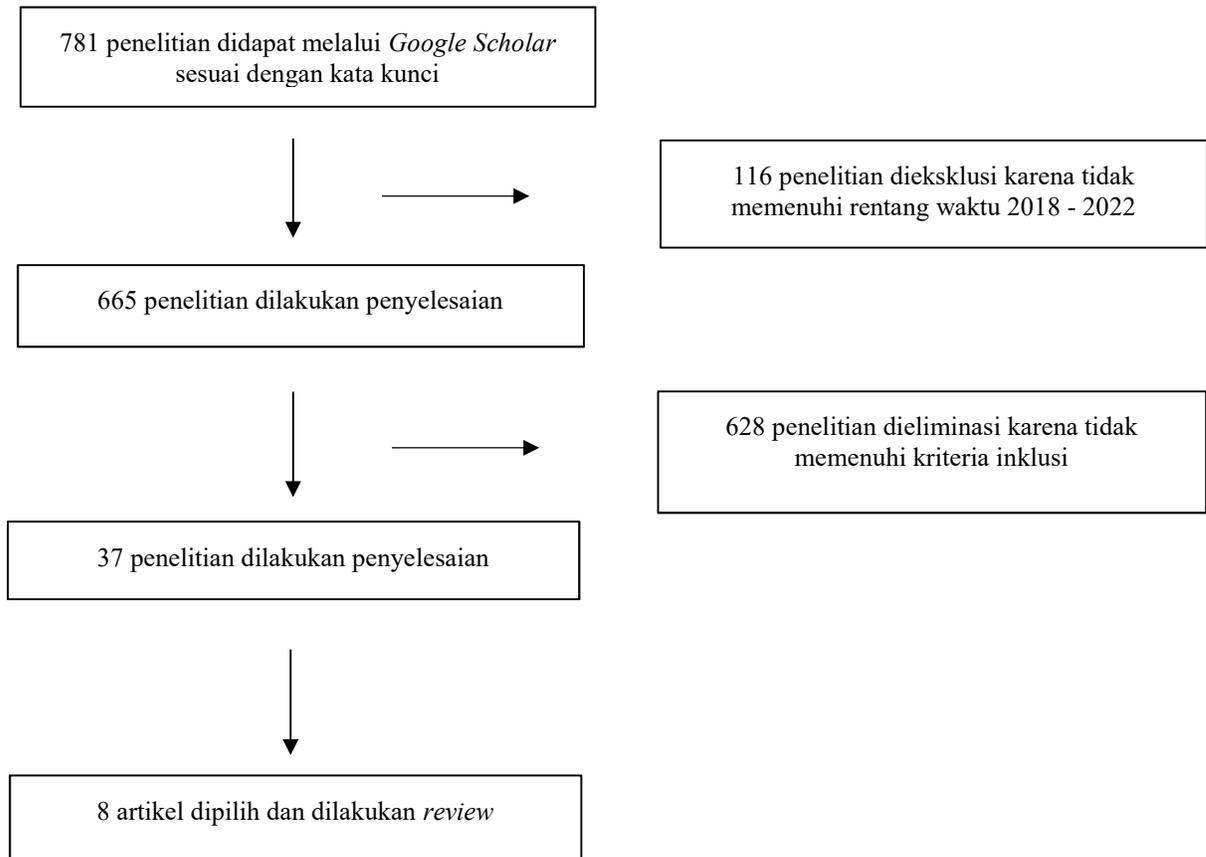
Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Perbankan merupakan salah satu contoh dari lembaga keuangan. Pengertian dari perbankan sendiri yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No 10 Tahun 1998). Sedangkan bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (Kasmir, 2015). Bank juga salah satu bentuk dari lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi individu, badan usaha hingga lembaga pemerintah untuk menyimpan dana yang dimiliki (Hermansyah, 2013).

Menurut UU No.20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan kemitraan yaitu suatu kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar (UU No. 20 Tahun 2008). Kemitraan juga diartikan

sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam jangka waktu tertentu dan saling menguntungkan seluruh pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kemitraan perbankan yaitu sebagai salah satu bentuk kerja sama yang dimana lembaga keuangan atau bank memiliki peran untuk pemberi modal dengan pelaku usaha sebagai penerima modal yang memiliki syarat dan ketentuan untuk mencapai tujuan bersama serta saling menguntungkan satu sama lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian disusun menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan metode pencarian data sekunder dari artikel nasional yang valid dan akurat. Studi literatur merupakan studi yang menyajikan materi yang sebelumnya telah diterbitkan pada jurnal dan melaporkan suatu fakta atau analisis baru. Penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari database pilihan seperti *google scholar* sesuai dengan tema yang digunakan dan kata kunci yaitu efektifitas, industri, perbankan, dan SDGs. Penelusuran menggunakan database tersebut dan pencarian judul yang sesuai dengan tema dieliminasi sesuai kriterianya. Jurnal-jurnal yang digunakan mulai dari tahun 2018-2022, lalu disesuaikan dengan tema pada artikel dan dianalisis.



## **HASIL**

Berdasarkan 781 jurnal yang dipublikasikan di *Google Scholar*, dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi sesuai rentang waktu 2018-2022, sehingga didapatkan 7 artikel dan 1 buku publikasi yang berkaitan dengan efektifitas dalam penerapan kemitraan industri perbankan guna mengimplementasikan SDGs.

**Tabel 1. Hasil Studi Literatur mengenai Efektifitas dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan guna Mengimplementasikan SDGs**

Penulis, Tahun	Judul	Tempat	Metode	Hasil
Sari, Dhany Efiti. (2018)	Pendidikan Literasi Keuangan Melalui Program Kemitraan Dengan Bank Untuk Mengurangi Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa	Surakarta, Indonesia	Studi Literatur	Hasil penelitian mengungkapkan solusi atau konsep yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan pelatihan literasi keuangan bagi mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melalui program kemitraan dengan bank untuk mengurangi perilaku belanja mahasiswa, seperti: Pelatihan literasi keuangan dengan menggunakan wahana literasi keuangan (SiMOLEK), simulasi produk perbankan, pembuatan kurikulum materi literasi keuangan, dan lain-lain..
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019)	Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	Jakarta, Indonesia	Pengamatan Langsung dan Studi Literatur	Penelitian menunjukkan bahwa promotor memainkan peran penting, termasuk mengundang pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi. Promotor juga memiliki perannya sendiri untuk memastikan bahwa model kemitraan adalah tindakan yang tepat untuk mencapai skala yang memadai. Pemrakarsa bisa berupa pemerintah/kepala negara, pengusaha, badan amal, perwakilan LSM dan peneliti terkemuka. Kunci penting berjalannya KMP ( <i>multi-stakeholder partnership</i> ) adalah mencari dan menawarkan insentif bagi para pihak. Insentif tidak selalu berupa uang, tetapi dapat berupa reputasi sebagai pihak yang aktif berkontribusi dalam penyampaian

				barang publik atau penyelesaian masalah kronis.
Kustina, Ketut Tanti., & Dewi, Ni Luh Putu Suci Aprilia. (2019)	Analisis Kemitraan Bank dan Koperasi dalam Bentuk Layanan <i>Branchless Banking</i> untuk Meningkatkan Pendapatan Koperasi	Denpasar, Indonesia	Wawancara dan Pengamatan Langsung	Hasil penelitian menunjukkan layanan <i>branchless banking</i> di KSU. Dengan menjadi agen bank, Mitra Karya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dibandingkan sebelum bekerja sebagai agen bank. Peningkatan pendapatan tercermin dalam laporan keuangan koperasi, yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam laporan SHU terjadi penambahan akun setelah koperasi menjadi agen bank yaitu akun pendapatan jasa lainnya. Akun ini mencatat seluruh <i>fee</i> yang dihasilkan koperasi dari kegiatan layanan <i>branchless banking</i> baik dari <i>fee</i> transaksi ataupun <i>fee</i> menjadi agen bank.
Andatu, Mabruri. (2021)	Regulasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Analisa Komparasi	Jakarta, Indonesia	Pengamatan Langsung	Hasil penelitian menunjukkan secara praktik Bank Syariah dan Bank Konvensional telah mengimplementasikan pembiayaan berkelanjutan pada perusahaan yang telah memiliki persyaratan dalam laporan keberlanjutan. Namun, dukungan finansial untuk pengelolaan berkelanjutan belum sepenuhnya dilaksanakan. Kemajuan penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan di industri perbankan Indonesia tercermin dari kualitas pelaporan keberlanjutan yang meliputi kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan. Laporan ini menyajikan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan, manajemen dan model organisasi dalam menerapkan kebijakan bisnis ramah lingkungan.

*ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA  
MENGUNAKAN ANALISIS RASIO TAHUN 2019-2021*

Supriadi dkk. (2021)	Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar	Makassar, Indonesia	Pengamatan Langsung	Hasil penelitian menunjukkan beberapa strategi bisnis yang diterapkan oleh PT Bank Pan Dubai Syariah seperti: meningkatkan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, mengikuti pedoman dan POJK mengenai insentif bagi yang terdampak Covid-19 untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, memperbaharui layanan digital untuk memastikan bahwa mereka selalu disimpan dalam kondisi baik.
Trimulato dkk. (2021)	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah	Makassar, Indonesia	Pengamatan Langsung dan Studi Literatur	Hasil penelitian menunjukkan melalui pembiayaan produktif, UKM perbankan syariah tidak hanya memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan peluang bagi pengembangan UKM. Pembiayaan produktif UMKM bank syariah mampu meningkatkan pendapatan, profitabilitas dan kesejahteraan pelaku UMKM karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi yang banyak melakukan transaksi dengan masyarakat.

Ramadhani, Citra. (2022)	Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa	Makassar, Indonesia	Pengamatan Langsung	Hasil penelitian menunjukkan dasar pelaksanaan pengelolaan kemitraan Bersama BUMDes dan POKDARWIS di Desa Biringgala adalah keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Biringgala baik secara anggaran maupun sumber daya manusia. Dalam prosesnya pengelolaan kemitraan di Desa Biringgala bersama BUMDes dan POKDARWIS meliputi pembangunan dan pengelolaan Desa Wisata, Pengoprasian Objek Desa Wisata dan pemasukan bagi masing-masing pihak pengelola.
Soenjoto, Wening Purbatin Palupi Soenjoto. (2022)	Analisa Kemitraan Perbankan pada Pelaku Usaha Mikro di Era Digital	Jombang, Indonesia	Studi Pustaka	Hasil studi menunjukkan pelaku usaha mikro merupakan pelaku usaha yang paling banyak di Indonesia. Bagi industri perbankan terkhusus perbankan syariah, proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan terhadap sektor wirausaha lebih menguntungkan dibandingkan sektor non-wirausaha karena sektor wirausaha mempunyai ketahanan usaha lebih kuat. Selain itu, pembiayaan wirausaha menerima alokasi donasi berdasarkan pemerintah terkait pengembangan kewirausahaan, lantaran alokasi pembiayaan yang relatif besar dan dipicu cita-cita pemerintah agar industri perbankan nasional mempunyai donasi lebih luas guna mendorong perkembangan sektor wirausaha.

## PEMBAHASAN

### Efektifitas dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan

Efektivitas merupakan kata yang tidak baku dari morfologi (pembentukan kata) “keefektifan” dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diadopsi dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “effectiveness”, kata efektif mempunyai makna: efek, pengaruh, akibat; kesesuaian pada suatu tindakan orang atau kelompok yang akan melaksanakan sebuah tugas dengan objek yang jelas sebelum dilaksanakan. Berdasarkan pengertian Ravianto

dalam (Mingkid et al., 2017), efektivitas merupakan tolak ukur suatu pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seorang pekerja menghasilkan pendapatan yang diharapkan. Hal ini membuktikan apabila suatu pekerjaan atau usaha yang dituntaskan dengan bentuk perencanaan, baik itu dalam waktu, biaya ataupun kualitasnya. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan pengertian dari efektif. Dengan kata lain, efektivitas adalah suatu kondisi yang merujuk pada tolak ukur suatu yang telah diperkirakan untuk dibuat agar tercapai dengan baik. Lebih banyak suatu perencanaan yang dibuat tercapai, akan semakin efektif pula kegiatan yang dilaksanakan, yang berarti efektivitas ialah sebagai suatu tingkatan tolak ukur keberhasilan yang dapat digapai melalui berbagai cara ataupun usaha baik secara tekstual maupun kontekstual.

Sumartono dalam (Mingkid et al., 2017) mengatakan bahwa suatu kemitraan merupakan cara untuk perencanaan suatu bisnis dalam pemasok dan pelanggan melakukan kesepakatan satu sama lain demi tercapainya tujuan perencanaan yang sama. Dalam kondisi yang efektif, ada beberapa target yang akan di gapai dalam suatu pelaksanaan hubungan kerja (kemitraan) yaitu, pertama meningkatkan grafik penghasilan dari usaha kecil dimasyarakat, kedua akan menumbuhkan pendapatan nilai tambah untuk masyarakat yang melakukan kemitraan, ketiga akan adanya pemerataan dan pemberdayaan usaha kecil yang ada dimasyarakat, keempat adanya peningkatan ekonomi dalam lingkup pedesaan, wilayah maupun nasional dan kelima yang terakhir yaitu adanya pertahanan ekonomi dalam tingkatan nasional. Pada dasarnya kemitraan adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling memberikan keuntungan dengan berbagai macam perencanaan untuk membuat suatu program kerjasama dalam meningkatkan segala aspek positif dari masing-masing pihak terkait. Kemitraan memiliki tujuan, yaitu mengembangan pembangunan yang menjadi diri sendiri atau bisa disebut tidak

ketergantungan dan berkelanjutan yang memiliki dasar dan struktur atau tahapan ekonomian yang baik.

Alhadeff (1951) dalam (Industri & Indonesia, n.d.) menegaskan bahwa dalam industri perbankan memiliki beberapa ciri khususnya. Lebih jelasnya ialah: pertama, memiliki dampak yang lebih dari satu penyedia kredit. Kedua, relasi antara piutang dan peminjam yang biasa disebut debitur dibuat atas dasar latar belakang yang memiliki hubungan dengan penyaluran kredit. Ketiga, peminjam kredit yang meminjam dengan skala besar akan diberikan suatu penawaran yang memiliki banyak keuntungan, sementara peminjam dalam skala kecil akan mendapatkan suatu suplai yang berjumlah terbatas. Keempat, akan ada hambatan pada saat datanya peminjam baru yang biasanya mempertahankan keadaan monopoli ataupun oligopo saat memperoleh pendapatan yang lebih dalam jangka panjang. Dan, kelima, ketentuan pemberi kredit biasanya akan memberikan korelasi terhadap sesuatu yang sering disebut dengan istilah *agreement*, *mutual assistance*, pengurangan kompetisi tak sehat, koordinasi, dan lain sebagainya. Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa eksistensi efektivitas implementasi kemitraan industri perbankan yang digunakan di Indonesia sudah berjalan dengan baik, tentunya melalui mitra perbankan ini, memberikan banyak keuntungan khususnya dalam sektor perekonomian di Indonesia. Fenomena ini dapat terjadi karena mitra industri perbankan memiliki perencanaan yang baik kerja mencapai skala yang memadai untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Tidak hanya tepat mencapai skala yang memadai kemitraan industri perbankan juga dapat meningkatkan pendapatan dari setiap mitranya. Adanya kemitraan industri perbankan juga memberikan pembiayaan berkelanjutan kepada setiap mitranya yang telah memiliki persyaratan dalam laporan berkelanjutan, namun dalam pasokan biaya yang dikeluarkan kepada kegiatan usaha masih sebagian penerapannya belum diterapkan secara merata.

Pada industri perbankan khususnya perbankan syariah, proses perencanaan suatu biaya yang dilakukan terhadap usaha yang ada di masyarakat atau yang biasa masyarakat Indonesia sebut dengan UMKM lebih memberikan dampak positif dibandingkan sektor non-wirausaha karena usaha yang di buat masyarakat banyak memiliki ketahanan bisnis lebih kuat dibandingkan dengan usaha yang bukan dimiliki masyarakat. Dengan bermitra industri perbankan tidak hanya memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, juga memberikan peluang kepada setiap sektor wirausaha atau UMKM (usaha mikro kecil &

menengah) di Indonesia. Produktifitas biaya UMKM (usaha mikro kecil & menengah) yang diberikan oleh perbankan syariah akan berdampak pada peningkatan perolehan laba, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai UMKM (usaha mikro kecil & menengah), karena perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran untuk intermediasi yang lebih sering melakukan perencanaan dengan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan identifikasi dari artikel yang kami gunakan dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan industri perbankan di Indonesia memiliki peran penting, khususnya untuk laju perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan dengan memberikan peluang kepada setiap sektor wirausaha atau UMKM untuk dapat produktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan setiap pelaku UMKM di Indonesia, dalam hal ini juga pemerintah turut andil dalam mengarahkan industri perbankan untuk dapat mendukung perkembangan sektor wirausaha di Indonesia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tidak mengurangi rasa hormat, kepada Ibu Marina Ery Setiyawati dan Bapak Cahya Arbitera sebagai dosen mata kuliah Manajemen Keuangan program studi S1 Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta serta seluruh rekan yang berkontribusi. Dengan rasa syukur yang begitu tulus, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan penulisan artikel ini.

**DAFTAR REFERENSI**

- Andatu, M. (2021). *Regulasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Analisa Komparasi*. Tesis.
- Bank Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan*
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Industri, K., & Indonesia, P. (n.d.). *Kompetisi Industri Perbankan Indonesia*. 417–440.
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2019). *Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Bappenas.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). *Siaran Pers: Peran Penting Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen dalam Implementasi Market Conduct pada Sektor Jasa Keuangan*.
- Kustina, K. T., & Dewi, N. L. P. S. A. (2019, Juli). *Analisis Kemitraan Bank Dan Koperasi Dalam Bentuk Layanan Branchless Banking Untuk Meningkatkan Pendapatan Koperasi*. *Accounting Profession Journal*, 1(1).
- Mingkid, J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2020). *Statistik Perbankan Indonesia Vol. 18 No. 8 Juli 2020*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 *tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*
- Ramadhani, C. (2022). *Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*.
- Sari, D. E. (2018, Juni). *Pendidikan Literasi Keuangan Melalui Program Kemitraan Dengan Bank Untuk Mengurangi Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 28(1).
- Soenjoto, W. P. P. (2022, April). *Analisa Kemitraan Perbankan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Era Digital*. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 1(1).
- Trimulato, Supriadi, Mustamin, A., Umar, S. H., & Ningsih, S. (2021). *Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03).
- Trimulato, Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021, April). *Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah*. *Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 10(1).